



# STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN

Iin Solihin

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

# Kebijakan Publik

- Kebijakan publik adalah **kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah** sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai **tujuan-tujuan tertentu di masyarakat** di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (William Dunn)

Masyarakat menjadi obyek Penyusunan kebijakan



Berorientasi pada kepentingan masyarakat

# Stakeholder?

- Freeman (1984) : stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
- Biset (1998) secara singkat mendefenisikan stekeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.
- Stakeholder diidentifikasi berdasarkan kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu dan atau posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

# Kategori Stakeholder

## Stakeholder Utama

- Stakeholder yang memiliki kaitan langsung dengan suatu kebijakan. Mis : masyarakat, tokoh masyarakat, manajer publik

## Stakeholder Pendukung

- Tidak memiliki keterkaitan langsung tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara

## Stakeholder Kunci


- Yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan sesuai dengan levelnya

# Pentingnya Memahami Stakeholder

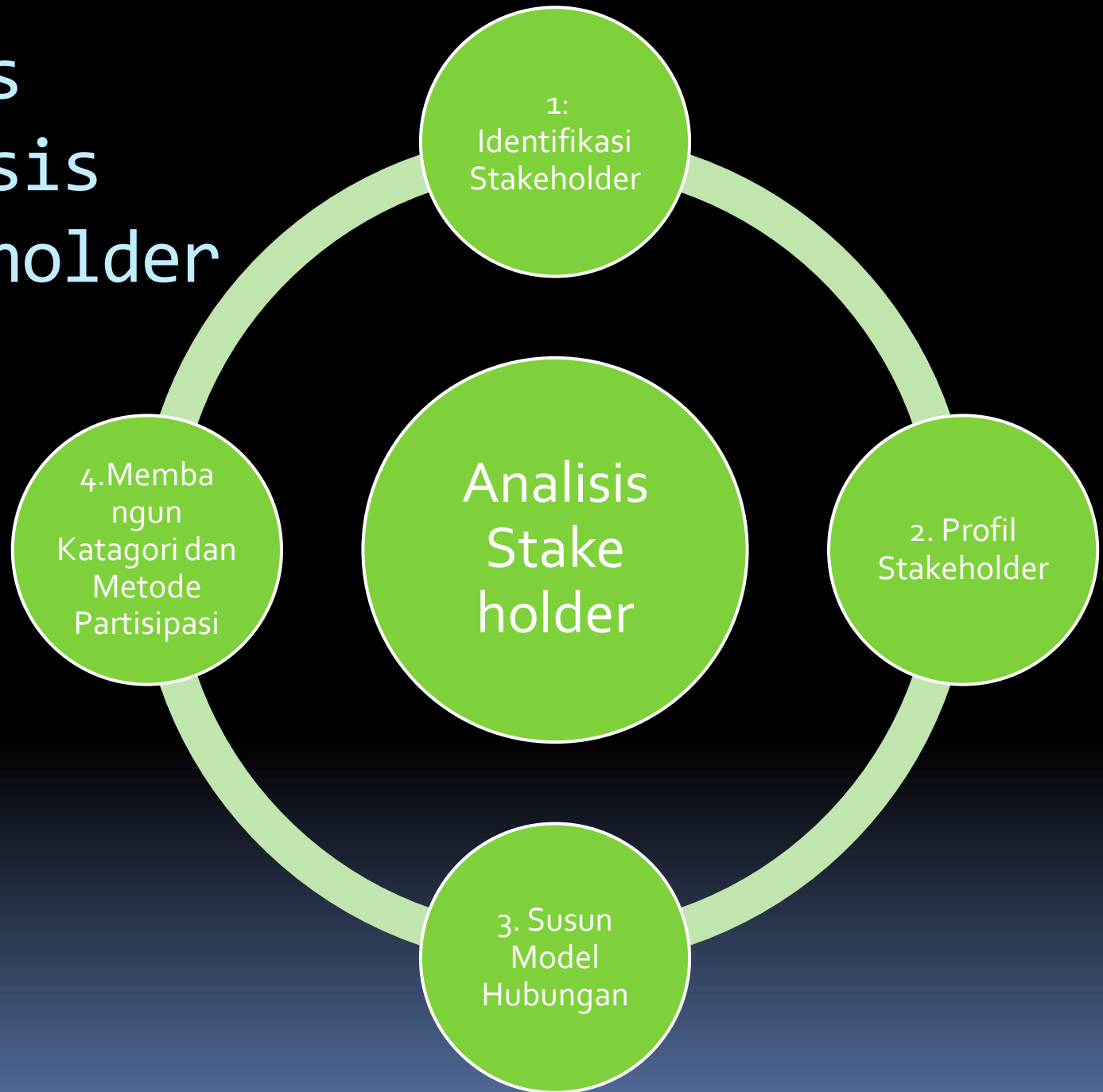
- Dapat menggunakan opini dari stakeholder untuk memuluskan kebijakan yang akan dibuat. Tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga input mereka dapat memperbaiki kualitas kebijakan
- Mendapatkan dukungan dari stakeholder yang kuat dapat membantu mendapatkan sumberdaya untuk keberhasilan kebijakan
- Dengan komunikasi lebih dini dan intensif, pembuat kebijakan dapat memahamkan orang tentang pentingnya kebijakan tersebut dan keuntungan yang akan diperoleh
- Dapat mengantisipasi reaksi orang dan membangunnya ke dalam rencana kebijakan yang akan disusun sehingga mereka dapat mendukung penuh



# Kesalahan Identifikasi Stakeholder

- Membuat kebijakan yang salah arah (*misleading policy*)
  - Potensi konflik
  - Adanya kemubaziran sumberdaya
- 

# Proses Analisis Stakeholder







Identifikasi  
Stakeholder

- Stakeholder merupakan individu, kelompok atau institusi yang berpengaruh thd usulan kebijakan atau hasil kebijakan (negatif maupun positif)
- **Tipe stakeholder** : Penerima manfaat (*beneficiaries*), pendukung (*supporters*), penentang (*opponents*), Penyedia Sumber Daya (*resource providers*), Kelompok Rentan (*vulnerable groups*)







Membuat  
Model  
Hubungan

- **Model hubungan diidentifikasi dengan beberapa pertanyaan :**
  - Apa hubungan antar stakeholder
  - Siapa mempengaruhi siapa
  - Siapa yang mengontrol semua

# *LADDER OF PARTICIPATION*

- Membantu pembuat kebijakan untuk menghubungkan kebijakan yang akan dibuat dengan berbagai level partisipasi stakeholder
- Terdiri dari 6 level partisipasi mulai dari sharing informasi sampai aktualisasi/pemberdayaan

# LADDER OF PARTICIPATION



Stakeholder hanya menyediakan informasi tanpa ada keinginan untuk mempengaruhi kebijakan

Pembuat kebijakan mendefinisikan masalah dan solusi dan dapat dimodifikasi setelah melihat respon dari stakeholder

Partisipasi terjadi setelah stakeholder diberi insentif

1) Keterlibatan terjadi setelah beberapa keputusan dibuat 2) grup ini tergantung pd faktor eksternal (lembaga donor...) tetapi juga bisa independen

Stakeholder berpartisipasi dengan melakukan analisis bersama dengan pengambil kebijakan

Stakeholder mengontrol semua pengambilan kebijakan dan sumberdaya dlm mengambil peran dalam kebijakan

# Membangun Kategori dan Metode Partisipasi

## 1. Membangun Kategori Partisipasi

- Menghubungkan setiap stakeholder dengan level partisipasinya
- Setiap stakeholder dapat berpartisipasi pada multi kategori dan berbagai level partisipasi

## 2. Identifikasi strategi dan metode praktis

- Beberapa metode membangkitkan partisipasi : workshop, kuisiner, interview, role play, brainstorming, Round Robin Discussion, Small Group Discussion, Survey dll

# Matriks Level Partisipasi

Stakeholder	Sharing informasi	Konsultasi	Insentif materi	Formasi fungsional kelompok	Kolaborasi dalam pengambilan keputusan	Pemberdayaan dan aktualisasi sendiri sebagai pengambil kebijakan

# Aktor Kebijakan di Indonesia

Nama Lembaga (Aktor)	Peran dan Wewenang
MPR	a. Menetapkan UUD, b. Menetapkan Tap MPR, c. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Presiden	a. Membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR, b. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
DPR	Membentuk Undang-Undang (bersama-sama dengan Presiden)

# ...lanjutan

Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"><li>Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan Undang-Undang (UU),</li><li>Menetapkan Keputusan Presiden (Keppres),</li><li>Menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang berisi petunjuk-petunjuk kepada instansi di bawahnya dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UUD, Tap MPR, UU dan PP.</li></ol>
Menteri	Menetapkan Peraturan Menteri (Permen) atau Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai peraturan pelaksanaan.



# ...lanjutan

Lembaga Pemerintah Non Departemen	Menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu: peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yg lebih tinggi derajatnya.
Direktorat Jenderal (Dirjen)	Menetapkan/mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dibidangnya masing-masing.
Badan-Badan Negara Lainnya	Mengeluarkan/menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

# ...lanjutan

Pemerintah Provinsi	Menetapkan Peraturan Daerah Proponsi (Perda Provinsi) dengan persetujuan DPRD Provinsi.
DPRD Provinsi	Menetapkan Peraturan Daerah Proponsi (Perda Provinsi) bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

# ...lanjutan

Pemerintah Kota/Kabupaten	Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota.
DPRD Kota/Kabupaten	Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


# ...lanjutan

Kepala Desa	Menetapkan Peraturan dan Keputusan Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).
BPD	Menetapkan Peraturan Desa atau Keputusan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa.



# Diskusi

Contoh Kasus :  
Penyusunan Kebijakan  
Pengembangan Industrialisasi  
Perikanan Tangkap di  
Pelabuhan Perikanan





**TERIMA KASIH**